



# **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**Jakarta**  
kota kolaborasi

## **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI SEM II TAHUN 2021 AUDITED**

Menuju Terwujudnya SDM  
Aparatur Pemerintah DKI  
Jakarta yang berjati diri,  
profesional dan berdaya  
saing Global



Jl. Medan Merdeka Selatan  
No. 8-9 Jakarta 10110



## KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta 5 (Lima) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi dan UPT KORPRI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



**Maria Qibtya**  
**NIP 196507191985032002**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1. Pendapatan	14
B.2. Belanja	14
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
C.1. Aset Lancar	18
C.2. Aset Tetap	20
C.3. Aset Lainnya	22
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	23
C.5. Ekuitas	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	24
D.1. Pendapatan LO	24
D.2. Beban Pegawai	26
D.3. Beban Barang	26
D.4. Beban Jasa	27
D.5. Beban Pemeliharaan	27
D.6. Beban Hibah	27
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
E.1. Ekuitas Awal	29
E.2. Surplus (Defisit) LO	29
E.3. Mutasi RK PPKD	29
E.4. Koreksi Ekuitas	29
E.5. Ekuitas Akhir	29
F. Pengungkapan Lain-lain	29

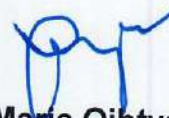


**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 (Lima) Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT KORPRI Semester II Tahun 2021 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berjalan sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



**Maria Qibtya**  
**NIP 196507191985032002**



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Gabungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada Semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp 338.590.815.004,- meningkat Rp 203.911.898.630,- dibandingkan belanja pada Semester II Tahun 2020 sebesar Rp 134.678.916.374,-. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan belanja pegawai sebesar 153,78% yang disebabkan oleh dibayarkannya gaji dan TKD CPNS formasi Tahun 2019 yang mulai dan dibayarkan gaji dan TPP nya TMT Bulan Maret Tahun 2021. Gaji dan TPP CPNS formasi Tahun 2019 akan dibayarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) disahkan, setelah itu akan dibayarkan oleh SKPD masing-masing. Pada bulan November 2021, seluruh gaji dan TPP CPNS telah dibayarkan oleh SKPD masing-masing. Selain itu, dibayarkannya juga utang pegawai tahun 2020 yang merupakan penundaan TPP PNS BKD akibat rasionalisasi untuk pendanaan penanggulangan Covid-19 sebesar 25% periode bulan April-November 2020 sebesar Rp 10.989.769.387,-.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Nilai Aset Konsolidasi per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 3.382.614.246,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 739.360.391,-, Aset Tetap sebesar Rp 2.610.104.347,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 33.149.508,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 5.559.962.891,- dan Rp (2.177.348.645),-. Nilai RK PPKD sebesar Rp 338.410.647.504,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan. Jumlah beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 328.826.287.223,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (328.826.287.223),-. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan Kegiatan Non-Operasional.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal Gabungan pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp (6.113.185.793),- ditambah Perubahan Ekuitas sebesar Rp 3.935.837.148,-. Sehingga Ekuitas Entitas Konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (2.177.348.645),-

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis Akrua.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 31 DESEMBER 2021	%	REALISASI 31 DESEMBER 2020
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	B.1	-	-	-	-
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	B.2.1	328.537.756.922	325.553.017.163	99,09	128.279.202.191
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	12.686.500.598	10.511.505.123	82,86	6.341.194.570
Belanja Hibah	B.2.3	2.658.886.720	2.464.937.718	92,71	-
JUMLAH BELANJA OPERASI		343.883.144.240	338.529.460.004	98,44	134.620.396.761
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.4	63.225.635	61.355.000	97,04	58.519.613
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA MODAL		63.225.635	61.355.000	97,04	58.519.613
JUMLAH BELANJA		343.946.369.875	338.590.815.004	98,44	134.678.916.374
SURPLUS/DEFSIT		(343.946.369.875)	(338.590.815.004)	98,44	(134.678.916.374)

**II. N E R A C A**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**

**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		31-Des-21	31-Des-20
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas Di Bendahara Pengeluaran		-	-
Piutang Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga		-	-
Beban Dibayar Dimuka		7.362.001	5
Persediaan		731.998.390	625.154.159
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>	<b>739.360.391</b>	<b>625.154.164</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin		19.058.688.032	19.087.982.881
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		155.295.450	155.295.450
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		(16.603.879.135)	(15.022.787.101)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>	<b>2.610.104.347</b>	<b>4.220.491.230</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud		-	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	-
Aset Lain-Lain		1.327.373.736	1.301.469.896
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(1.294.224.228)	(1.270.531.696)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>C.3</b>	<b>33.149.508</b>	<b>30.938.200</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.382.614.246</b>	<b>4.876.583.594</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Belanja Pegawai		5.559.962.891	10.989.769.387
Utang Belanja		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>5.559.962.891</b>	<b>10.989.769.387</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>C.4</b>	<b>5.559.962.891</b>	<b>10.989.769.387</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas		(340.587.996.149)	(6.113.185.793)
RK PPKD		338.410.647.504	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>C.5</b>	<b>(2.177.348.645)</b>	<b>(6.113.185.793)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3.382.614.246</b>	<b>4.876.583.594</b>



**III. LAPORAN OPERASIONAL**  
**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		-	-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>D.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			
Pendapatan Hibah - LO		-	-
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	<b>D.2</b>	314,472,911,283	173,351,911,242
Beban Barang	<b>D.3</b>	1,328,675,651	1,269,584,816
Beban Jasa	<b>D.4</b>	8,920,004,659	5,238,443,054
Beban Pemeliharaan	<b>D.5</b>	148,618,586	48,187,274
Beban Hibah	<b>D.6</b>	2,464,937,718	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	<b>D.7</b>	1,491,139,326	1,825,913,408
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>328,826,287,223</b>	<b>181,734,039,794</b>
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga - LO		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(328,826,287,223)</b>	<b>(181,734,039,794)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
Ekuitas - LO		(6,113,185,793)	6,644,775,134
RK PPKD		-	-
<b>JUMLAH EKUITAS AWAL</b>	<b>E.1</b>	<b>(6,113,185,793)</b>	<b>6,644,775,134</b>
Surplus/Defisit - LO	E.2	(328,826,287,223)	(181,714,039,794)
Mutasi RK PPKD	E.3	338,410,647,504	168,956,078,878
Koreksi Ekuitas	E.4	(5,648,523,133)	(11)
<b>JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS</b>		<b>3,935,837,148</b>	<b>(12,757,960,927)</b>
Ekuitas - LO		(340,587,996,149)	(175,069,264,671)
RK PPKD		338,410,647,504	168,956,078,878
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>(2,177,348,645)</b>	<b>(6,113,185,793)</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten pemerintah.

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 256 Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

**a. Kepala Badan**

Mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;

**b. Sekretariat**

Mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi BKD;

**c. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan serta pendayagunaan pegawai;

**d. Bidang Pengembangan**

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai;

**e. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun**

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai;

**f. Bidang Pengendalian Pegawai**

Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pegawai;



**g. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi**

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

**h. Unit Pelaksana Teknis**

Melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi BKD.

**i. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BKD.

Sejak 1 Januari 2016 Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak lagi merupakan unit Kerja BKD pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ketentuan pencabutan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pasal 74 huruf b.

Sejak 1 Januari 2017, nomenklatur Kantor Kepegawaian Kota berubah menjadi Suku Badan Kepegawaian Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Sejak 1 Januari 2017, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Korpri dan berkedudukan dibawah Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan harga pembelian.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

**d. Aset Lainnya**

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**(6) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI KEUANGAN**

**B.1. Pendapatan**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

**B.2. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja Gabungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 338.590.815.004,- atau 98,44% dari Anggaran sebesar Rp 343.946.369.875,-

**B.2.1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Gabungan BKD Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Kantor Kepegawaian pada Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 325.553.017.163,- atau mencapai 99,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp 328.537.756.922,-.

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan belanja pegawai sebesar 153,78% yang disebabkan oleh dibayarkannya gaji dan TKD CPNS formasi Tahun 2019 yang mulai dan dibayarkan gaji dan TPP nya TMT Bulan Maret Tahun 2021. Gaji dan TPP CPNS formasi Tahun 2019 akan dibayarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) disahkan, setelah itu akan dibayarkan oleh SKPD masing-masing. Pada bulan November 2021, seluruh gaji dan TPP CPNS telah dibayarkan oleh SKPD masing-masing.

Selain itu, dibayarkannya juga utang pegawai tahun 2020 yang merupakan penundaan TPP PNS BKD akibat rasionalisasi untuk pendanaan penanggulangan Covid-19 sebesar 25% periode bulan April-November 2020 sebesar Rp 10.989.769.387,-.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Semester II Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam Tabel berikut:

### Belanja Pegawai

KODE REKENING	BELANJA PEGAWAI	PAGU ANGGARAN	REALISASI							TOTAL REALISASI
			BKD	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	
5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok	89.052.340.480	88.665.080.880	-	-	-	-	-	-	88.665.080.880
5.1.01.01.02.0001	Tunjangan Keluarga	4.703.427.602	4.658.087.986	-	-	-	-	-	-	4.658.087.986
5.1.01.01.03.0001	Tunjangan Jabatan	544.820.000	536.720.000	-	-	-	-	-	-	536.720.000
5.1.01.01.04.0001	Tunjangan Fungsional	325.340.000	315.260.000	-	-	-	-	-	-	315.260.000
5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Umum	7.459.150.000	7.439.155.000	-	-	-	-	-	-	7.439.155.000
5.1.01.01.07.0001	Tunjangan Khusus (PPH)	12.571.191.762	12.561.157.015	-	-	-	-	-	-	12.561.157.015
5.1.01.01.06.0001	Tunjangan Beras	5.668.013.789	5.615.012.280	-	-	-	-	-	-	5.615.012.280
5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji	1.488.908	1.460.440	-	-	-	-	-	-	1.460.440
5.1.01.01.10.0001	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.461.125.117	6.215.930.510	-	-	-	-	-	-	6.215.930.510
5.1.01.01.11.0001	Iuran Jaminan Kematian	19.145.577.603	18.647.633.070							
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.716.000.000	2.647.825.000	-	-	-	-	-	-	2.647.825.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	179.889.281.661	178.249.694.982	-	-	-	-	-	-	178.249.694.982
<b>TOTAL</b>		<b>328.537.756.922</b>	<b>325.553.017.163</b>	-	-	-	-	-	-	<b>325.553.017.163</b>

**B.2.2. Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar 82,86% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2021**

SKPD/UKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	10.465.992.766	8.421.689.779	80,47
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	84.554.063	66.574.889	78,74
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	87.086.116	86.317.050	99,12
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	97.356.679	88.274.230	90,67
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	80.892.229	78.887.900	97,52
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	99.330.024	93.056.335	93,68
UPT KORPRI	1.771.288.721	1.676.704.940	94,66
JUMLAH	12.686.500.598	10.511.505.123	82,86

**B.2.3. Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp 2.464.937.718,- atau 92,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.658.886.720,-. Adapun belanja hibah ini diberikan kepada Badan dan Yayasan yang berada dibawah naungan Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI yaitu Badan Cendana Bakti Jaya, Yayasan KORPRI, dan Paguyuban Werdatama Jaya. Rincian realisasi belanja hibah pada 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:



Rincian Belanja Hibah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		31-Des-21	%
<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>2.658.886.720</b>	<b>2.464.937.718</b>	<b>92,71</b>
Belanja Hibah Yayasan KORPRI	284.038.720	224.747.720	79,13
Belanja Badan Cendana Bakti Jaya	1.726.420.000	1.641.761.998	95,10
Belanja Hibah Paguyuban Werdatama Jaya	648.428.000	598.428.000	92,29

B.2.4. Belanja Modal

Hingga 31 Desember 2021, terdapat realisasi belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2021

SKPD/UKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	38.500.000	38.500.000	100,00
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	-
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	24.725.635	22.855.000	92,43
UPT KORPRI	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>63.225.635</b>	<b>61.355.000</b>	<b>97,04</b>

Dari Rp 63.225.635,- yang dianggarkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota Jakarta Selatan untuk Belanja Modal, hingga 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar 97,04% atau Rp 61.355.000,-.

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

a. Kas

Rincian saldo kas konsolidasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

REKAPITULASI KAS (KONSOLIDASI)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
ASET	-	-	-	-	-	-	-	-
ASET LANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Uang Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Titipan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya meliputi:

- Seluruh kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota Administrasi.
- Seluruh kas yang merupakan sisa uang muka kerja yang masih berada di bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota Administrasi yang belum dipertanggungjawabkan/disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.
- Seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas daerah.

Seluruh saldo kas di Bendahara Pengeluaran telah disetorkan kepada kas daerah sehingga per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-.

**b. Beban Dibayar Dimuka**

Pada Semester II Tahun 2021 terdapat sisa saldo Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan UPT KORPRI yang pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 7.139.258,- dan Rp 222.743,- sehingga terdapat total sebesar Rp 7.362.001,- yang diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka pada Neraca. Nilai ini akan dipakai untuk pembelian BBM Kendaraan Dinas Operasional pada Semester II Tahun 2021.

**c. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

URAIAN REKENING	JUMLAH
<b>Persediaan</b>	<b>731.998.390</b>
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	584.712.698
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat	16.679.482
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Utara	13.259.400
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat	86.993.273
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Selatan	5.118.025
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Timur	17.343.221
UPT KORPRI	7.892.291

Posisi persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 731.998.390,- merupakan sisa persediaan Alat Tulis Kantor. Persediaan ini dinilai dengan menggunakan harga perolehan yang berada di gudang persediaan BKD Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Kepegawaian Kota Administrasi.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2021 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan.

## C.2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai perolehan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.058.688.032,-. Terdapat pengurangan aset tetap pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu pengembalian 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Double Cabin Navara VL 2.5 4X4 AT senilai Rp 451.000.000,- sesuai BAST Nomor 7696/-077.3 tanggal 18 Juni 2021 kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat penambahan aset tetap yaitu penerimaan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Corolla Altis Tahun 2015 senilai Rp 406.830.000,- sesuai BAST Nomor 1929/-077.323 tanggal 13 Agustus 2021 dari Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2021, terdapat reklasifikasi aset tetap menjadi aset ekstrakomtabel dengan rincian sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 10.582.428,-;
2. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 1.993.041,-.

Reklasifikasi ini dilakukan karena harga satuan barang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebesar Rp 500.000,- sesuai Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 Badan Kepegawaian Daerah, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota adalah sebagai berikut:

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
<b>ASET TETAP</b>	<b>13.452.303.943</b>	<b>629.040.713</b>	<b>450.521.008</b>	<b>1.181.495.758</b>	<b>385.268.400</b>	<b>680.051.234</b>	<b>2.435.302.426</b>	<b>19.213.983.482</b>
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	13.452.303.943	629.040.713	450.521.008	1.181.495.758	385.268.400	638.935.784	2.321.122.426	19.058.688.032
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	41.115.450	114.180.000	155.295.450
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(11.470.854.154)</b>	<b>(570.132.306)</b>	<b>(413.978.449)</b>	<b>(1.111.592.958)</b>	<b>(347.701.420)</b>	<b>(607.399.594)</b>	<b>(2.082.220.254)</b>	<b>(16.603.879.135)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.470.854.154)	(570.132.306)	(413.978.449)	(1.111.592.958)	(347.701.420)	(607.399.594)	(1.990.876.254)	(16.512.535.135)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	(91.344.000)	(91.344.000)
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>1.981.449.789</b>	<b>58.908.407</b>	<b>36.542.559</b>	<b>69.902.800</b>	<b>37.566.980</b>	<b>72.651.640</b>	<b>353.082.172</b>	<b>2.610.104.347</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan pertama kali yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

C.3. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) Mempunyai aset lainnya yaitu aset rusak berat senilai Rp 33.149.508,- sebagai berikut :

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
ASET LAINNYA	748.454.818	64.147.306	271.573.500	51.967.232	191.230.880	1.327.373.736
Aset Tetap - Rusak Berat	664.342.218	64.147.306	271.573.500	51.967.232	174.415.880	1.226.446.136
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penyelesaian Status Aset	84.112.600	-	-	-	16.815.000	100.927.600
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(734.971.418)	(47.508.706)	(271.573.500)	(51.151.032)	(189.019.572)	(1.294.224.228)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap- Rusak Berat	(650.858.818)	(47.508.706)	(271.573.500)	(51.151.032)	(172.204.572)	(1.193.296.628)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(84.112.600)	-	-	-	(16.815.000)	(100.927.600)
TOTAL ASET LAINNYA	13.483.400	16.638.600	-	816.200	2.211.308	33.149.508

Pada Tahun 2021, terdapat penghapusan nilai Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penyelesaian Status Aset pada Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Majelis Penyelesaian Status Aset yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 8.000.540,-. Adapun barang yang dihapus berupa filing kabinet kayu sebanyak 2 buah dengan harga satuan sebesar Rp 4.000.270,-.

#### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 5.559.962.891,- dan Rp 10.989.769.387,-. Kewajiban jangka pendek ini merupakan utang belanja pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

NO	UTANG BELANJA PEGAWAI	31-Des-21	31-Des-20
1	Utang PPh Pegawai	225.751.726	-
2	Utang Tunjangan Transport Pejabat	233.500.000	-
3	Utang TPP Pegawai	5.087.616.165	10.989.769.387
4	Utang TPP PLT Pejabat	13.095.000	-
Jumlah		5.559.962.891	10.989.769.387

Utang PPh pegawai terjadi karena kurangnya anggaran untuk kode rekening Belanja PPh Penghasilan Pegawai karena belum terbayarnya PPh Gaji 13 dan THR Tahun 2021 yang belum dihitung oleh BPKD dan Dinas Kominfo sementara proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2021 telah ditetapkan. Sehingga dengan sisa anggaran yang tersedia tidak dapat dibayarkan keseluruhannya.

Adapun utang tunjangan transport pejabat, TPP pegawai dan TPP PLT Pejabat merupakan tunjangan bulan Desember 2021 yang akan diterima pada bulan Januari 2022. Pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diakui sebagai utang. Namun pada tahun 2021, seluruh tunjangan bulan Desember 2021 tersebut diakui sebagai utang pegawai. Seluruh utang belanja pegawai telah dibayarkan pada bulan Januari 2022 dengan menggunakan APBD Tahun 2022.

#### C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian, yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Penyajian akun Ekuitas sejak tahun 2015 berbeda dengan penyajian di tahun-tahun sebelumnya, dimana sebelumnya Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Perubahan ini dikarenakan mulai tahun 2015,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggunakan basis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 di Neraca Konsolidasi sebesar Rp (2.177.348.645),- adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN REKENING	31-Des-21	31-Des-20
<b>EKUITAS</b>	<b>(2.177.348.645)</b>	<b>(6.113.185.793)</b>
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	(2.973.177.746)	(7.184.225.581)
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat	75.587.889	98.100.730
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Utara	49.801.959	81.003.041
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat	173.534.673	176.948.760
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Selatan	42.685.005	68.093.660
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Timur	90.811.061	79.586.212
UPT KORPRI	363.408.514	567.307.385

**D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

**D.1. Pendapatan LO**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri tidak memiliki anggaran Pendapatan LO pada Tahun 2021.

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
PENDAPATAN - LO	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN								
BEBAN OPERASI								
Beban Pegawai	314.472.911.283	-	-	-	-	-	-	314.472.911.283
Beban Barang	1.015.426.844	23.570.387	41.903.329	15.156.917	23.841.075	31.048.582	177.728.517	1.328.675.651
Beban Jasa	7.244.434.024	28.353.600	50.635.200	41.580.000	50.160.000	50.661.600	1.454.180.235	8.920.004.659
Beban Pemeliharaan	88.395.725	4.222.500	3.635.500	-	1.545.000	8.378.810	42.441.051	148.618.586
Beban Hibah	2.464.937.718	-	-	-	-	-	-	2.464.937.718
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.152.300.598	32.941.243	21.344.103	34.951.400	28.750.480	14.597.494	206.254.008	1.491.139.326
<b>TOTAL BEBAN OPERASI</b>	<b>326.438.406.192</b>	<b>89.087.730</b>	<b>117.518.132</b>	<b>91.688.317</b>	<b>104.296.555</b>	<b>104.686.486</b>	<b>1.880.603.811</b>	<b>328.826.287.223</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(326.438.406.192)</b>	<b>(89.087.730)</b>	<b>(117.518.132)</b>	<b>(91.688.317)</b>	<b>(104.296.555)</b>	<b>(104.686.486)</b>	<b>(1.880.603.811)</b>	<b>(328.826.287.223)</b>



## D.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 314.472.911.283,-, terjadi peningkatan sebesar Rp 141.121.000.041,- atau sebesar 81,41% dari Semester II Tahun 2020 sebesar Rp 173.351.911.242,-. Hal ini disebabkan adanya pembayaran gaji dan TPP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 yang mulai bekerja dan dibayarkan gajinya TMT bulan Maret 2021 sampai proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) ditetapkan. Mulai pada bulan November 2021, gaji dan TPP mulai dibayarkan oleh SKPD masing-masing. Selain itu, dibayarkannya juga utang pegawai tahun 2020 yang merupakan penundaan TPP PNS BKD akibat rasionalisasi untuk pendanaan penanggulangan Covid-19 sebesar 25% periode bulan April-November 2020 sebesar Rp 10.989.769.387,-.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

## D.3. Beban Barang

Jumlah Beban Barang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.328.675.651,-. Beban barang pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 59.090.835 atau 4,65% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp 1.269.584.816,-, kondisi keuangan dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membaik sehingga kegiatan mulai bisa diselenggarakan. Beban Barang adalah konsumsi atas barang-barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

#### **D.4. Beban Jasa**

Jumlah Beban Jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.920.004.659,-. Bebas jasa pada Tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 3.681.561.605,- atau 70,28% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp 5.238.443.054,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

Jumlah Beban Pemeliharaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 148.618.586,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta meliputi pemeliharaan kendaraan dinas operasional (KDO) dan sarana prasarana kantor seperti komputer, laptop, printer dan mesin absensi.

#### **D.6. Beban Hibah**

Jumlah Beban Hibah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.464.937.718,-. Beban Hibah adalah pengakuan atas pemberian bantuan barang/uang kepada entitas berupa yayasan, instansi, partai politik maupun LSM yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2021, Beban Hibah mulai dibebankan langsung kepada SKPD pada tahun 2021, sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai PPKD. Penerima Hibah dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah badan dan yayasan yang berada dibawah naungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yaitu Badan Cendana Bakti Jaya, Yayasan KORPRI, dan Paguyuban Werdatama Jaya.

#### **D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.491.139.326,-. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari aset tetap dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

## E.PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir.

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
<b>EKUITAS AWAL</b>								
Ekuitas - LO	(7.184.225.581)	98.100.730	81.003.041	176.948.760	68.093.660	79.586.212	567.307.385	(6.113.185.793)
RK PPKD	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS AWAL</b>	<b>(7.184.225.581)</b>	<b>98.100.730</b>	<b>81.003.041</b>	<b>176.948.760</b>	<b>68.093.660</b>	<b>79.586.212</b>	<b>567.307.385</b>	<b>(6.113.185.793)</b>
<b>PERUBAHAN EKUITAS</b>								
Surplus/Defisit LO	(332.088.705.576)	(89.087.730)	(117.518.132)	(91.688.317)	(104.296.555)	(104.686.486)	(1.880.603.811)	(334.476.586.607)
Mutasi RK PPKD	336.297.977.160	66.574.889	86.317.050	88.274.230	78.887.900	115.911.335	1.676.704.940	338.410.647.504
Koreksi Ekuitas	1.776.251	-	-	-	-	-	-	1.776.251
<b>JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS</b>	<b>4.211.047.835</b>	<b>(22.512.841)</b>	<b>(31.201.082)</b>	<b>(3.414.087)</b>	<b>(25.408.655)</b>	<b>11.224.849</b>	<b>(203.898.871)</b>	<b>3.935.837.148</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>								
Ekuitas - LO	(339.271.154.906)	9.013.000	(36.515.091)	85.260.443	(36.202.895)	(25.100.274)	(1.313.296.426)	(340.587.996.149)
RK PPKD	336.297.977.160	66.574.889	86.317.050	88.274.230	78.887.900	115.911.335	1.676.704.940	338.410.647.504
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>(2.973.177.746)</b>	<b>75.587.889</b>	<b>49.801.959</b>	<b>173.534.673</b>	<b>42.685.005</b>	<b>90.811.061</b>	<b>363.408.514</b>	<b>(2.177.348.645)</b>

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp (6.113.185.793),-.

### **E.2. Surplus / (Defisit) LO**

Nilai Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp (328.826.287.223),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3. Mutasi RK PPKD**

Nilai Mutasi RK PPKD pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 338.410.647.504,-.

### **E.4. Koreksi Ekuitas**

Nilai Koreksi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp (5.648.523.133),-. Nilai ini merupakan koreksi kelebihan catat akumulasi penyusutan aset yang disebabkan oleh perubahan kode barang dan perubahan masa umur manfaat barang.

### **E.5. Ekuitas akhir**

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp (2.177.348.645),-.

## **F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah satu buah rekening di Bank DKI Kantor Cabang Utama Balaikota dengan Nomor Rekening 108.02.01433.7 atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.